

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II POLMAS**

(Kasus Proyek Pembangunan Inpres Desa Pelita IV)



BUSUWA

OLEH

MARLINA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEM-
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II POLMAS
(Kasus Proyek Pembangunan Inpres
Desa Pelita IV)

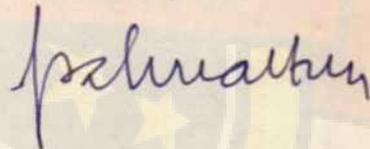
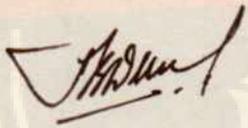
Nama mahasiswa : M a r l i n a

Nomor Stb/NIRM : 45 86 020 362 / 871133392

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



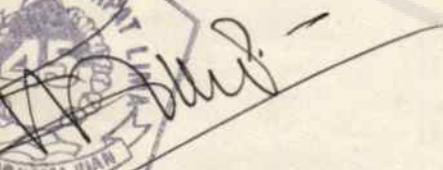
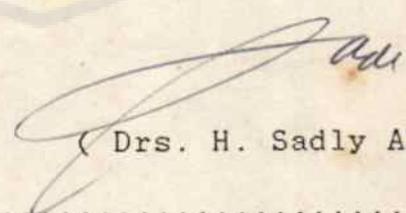
(Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah)

(Drs. H.P.S. Rahim, MS)

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan administrasi
Negara


(Drs. H.M. Thala)
(Drs. H. Sadly AD, MPA)

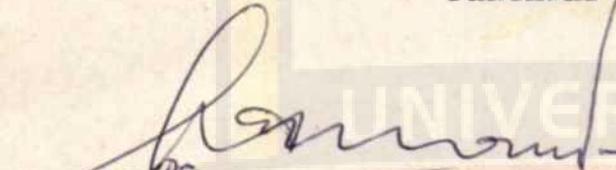
Tanggal Pengesahan :

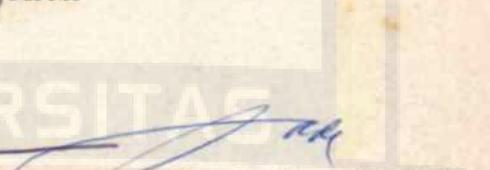
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Jumat 31 Mei 1991
N a m a : M A R L I N A
Nomor stb/Nirm : 45 86 020 362 / 871133392

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara.

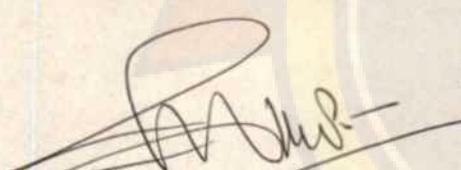
PENGAWAS UMUM


Prof. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"


Drs. H. Sadly AD, MPA
Dekan Fisipol unhas


Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah
Anggota

PANITIA UJIAN


Drs. H. Moh. Thala
Ketua


Drs. Guntur Karnaeni
Sekretaris

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah (.....)
2. Drs. Tatjong Mappawata, MA (.....)
3. Drs. J. Daniel (.....)
4. Drs. Misbahuddin Achmad, MS (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan karena atas karuniaNya, sehingga penulis mampu mengadakan penelitian sampai selesainya laporan penelitian atau skripsi ini dengan judul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II POLMAS (Kasus Proyek Pembangunan Inpres Desa Pelita IV)".

Dalam proses penelitian karya ilmiah ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan, terutama untuk mendapatkan data primer.

Walaupun demikian, penulis tak pernah mengenal putus asa, serta berusaha semaksimal mungkin agar karya ilmiah ini dapat selesai.

Sehubungan dengan itu, penulis menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan manusia, olehnya itu tanpa dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka skripsi ini tak mungkin rampung sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pro. Dr.H.M.Syukur Abdullah dan Bapak Drs.H.P.S.Rahim,MS, serta Bapak Drs. Mastam Ladeng, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk serta kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif sejak

persiapan penelitian, penyusunan sampai selasainya skripsi dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, yang telah banyak berkorban dan senantiasa memanjatkan Do'a sehingga penulis mencapai sukses dalam study sampai selasai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

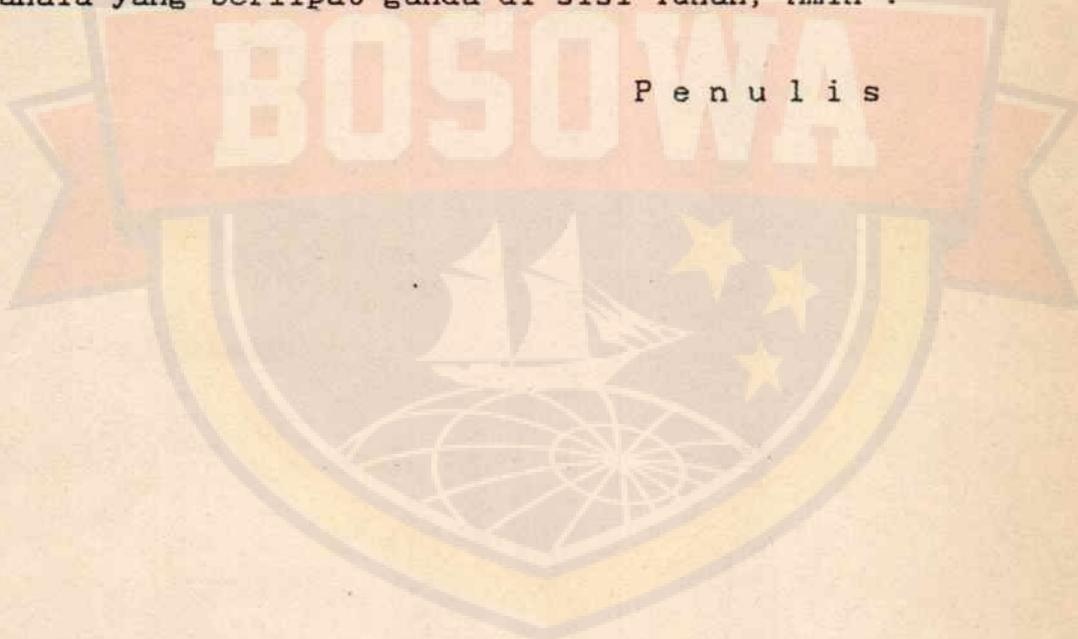
Dan tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.MR.Dr.A.Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45".
2. Bapak Drs H.M. Thala, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
3. Bapak Drs.Sadly AD,MPA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
4. Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama mengikuti kuliah.
5. Pemerintah Daerah dan masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
6. Saudara Drs.Tamsil Pida dan Saudara Drs.Abd.Latif Batik, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak-Bapak/Ibu-Ibu serta rekan-rekan yang tidak sempat disebut namanya satu persatu, yang telah memberikan input-input kepada penulis.
8. Dan akhirnya kepada saudara-saudara penulis, serta seluruh sanak famili yang karena dorongan dan bantuannya, sehingga penulis yang saat ini telah dapat menyelesaikan studi.

Semoga segala budi baik dan amal bakti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara(i), senantiasa mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda di sisi Tuhan, Amin !

P e n u l i s



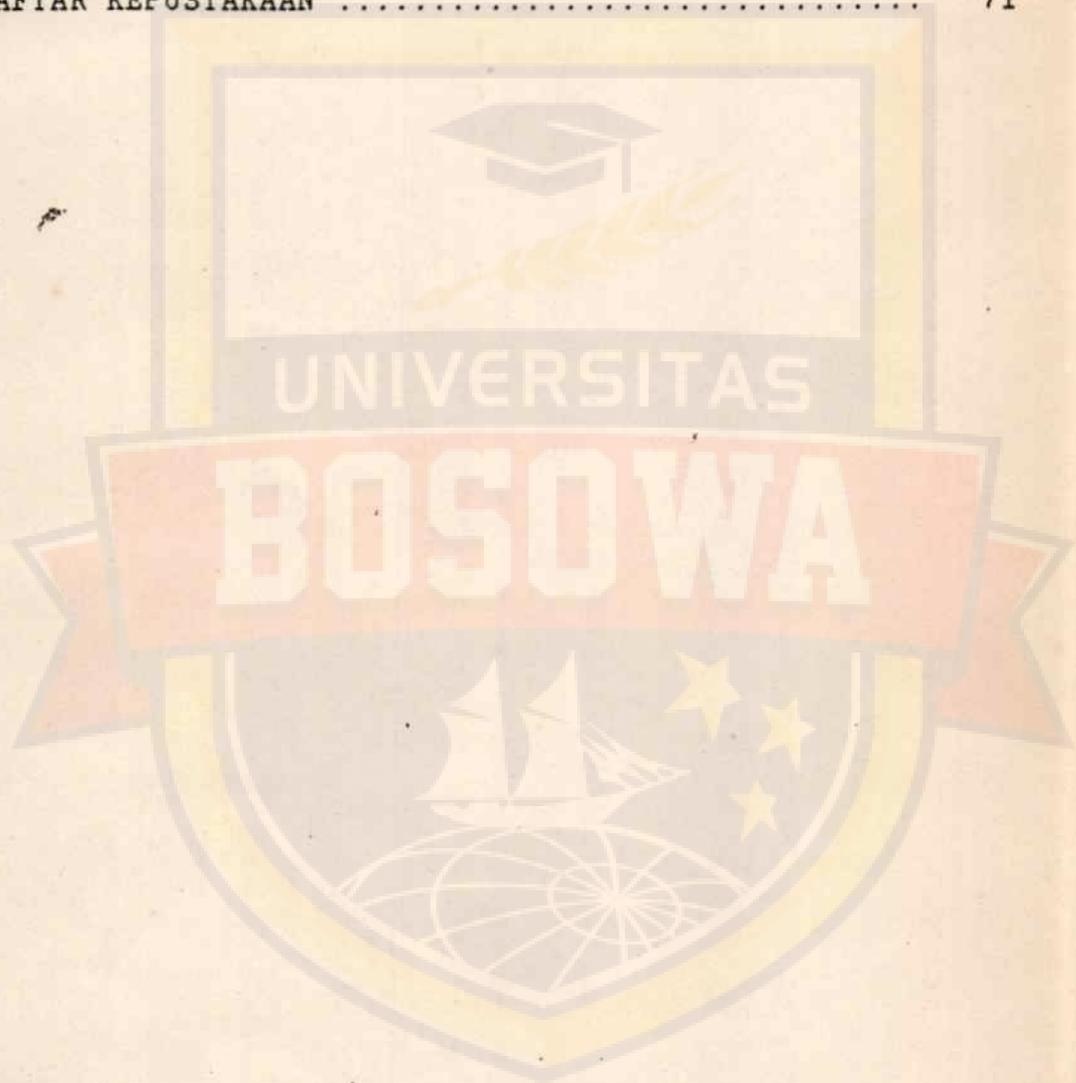
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	17
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ...	20
C. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	25
D. Tujuan Penyaluran Dana Inpres Bantuan Desa	30
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak dan Keadaan Geografis	32
B. Keadaan Demografi	34
C. Pola Umum Pembangunan Daerah dalam Repelita IV	37
D. Bentuk Swadaya Murni Masyarakat	44
BAB IV. BAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	47
B. Hasil-hasil yang Dicapai	59
C. Faktor-Faktor Penghambat	64

BAB V. P E N U T U P

A. Kesimpulan	68
B. S a r a n	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
--------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
I.	PERINCIAN LUAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS	33
II.	KEADAAN PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS MENURUT PERKEMBANGAN TIAP KECAMATAN DALAM TAHUN 1985 S/D 1989 (Dalam Jiwa).....	35
III.	KEADAAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS TAHUN 1989 (Dalam jiwa)	37
IV.	PROYEK-PROYEK SWADAYA MURNI MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS DALAM PELITA IV	46
V.	TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS, N = 20	51
VI.	BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS , N = 60	54
VII.	TANGGAPAN RESPONDEN PEJABAT TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II POLMAS, N = 20 ..	56
VIII.	TANGGAPAN RESPONDEN PEJABAT TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II, N = 20	58
IX.	HASIL-HASIL YANG DICAPAI INPRES BANTUAN DESA DAERAH TINGKAT II POLMAS DALAM PELITA IV	60

A B S T R A K

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk itu pembangunan daerah meliputi seluruh kegiatan pembangunan sektoral maupun regional yang bersumber dari dan APBN, APBD, bantuan Inpres/bantuan lainnya dan pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah Tingkat II Polmas dan sejauhmana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama pelita IV, khususnya pembangunan proyek Inpres Bantuan Desa serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tingkat prosentase tanggapan responden.

Dalam rangka mendapatkan data, selain melalui studi kepustakaan, penulis juga mempergunakan penelitian lapangan dengan dasar penelitian studi kasus yang bertipe eksploratif, yang bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah teknik wawancara dan

kuesioner. Kedua teknik pengumpulan data ini, dapat membantu dalam mengadakan penelitian secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitalan terhadap permasalahan yang telah ditentukan, maka ternyata tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah Tingkat II Polmas cukup baik. Hal ini berdasarkan prosentase tanggapan responden, kemudian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama pelita IV, khususnya pembangunan Inpres Bantuan Desa menunjukkan angka yang menggembirakan. Tapi namun demikian masih terdapat berbagai kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Sedangkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan atau masukan terhadap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, agar lebih dapat meningkatkan pelaksanaannya di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, adalah tidak lain untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan tahapan-tahapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dimana dalam setiap repelita mempunyai tujuan yang ingin dicapai, hal ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Seperti halnya dalam Repelita III bangsa Indonesia telah mencapai hasil yang positif, sehingga terciptalah suasana yang mantap untuk melanjutkan dalam Repelita IV.

Berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sejak dari Repelita I sampai sekarang, maka bangsa Indonesia telah bertekad untuk mempercepat tercapainya sasaran utama pembanguan jangka panjang yaitu terciptanya landasan bagi bangsa Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. landasan yang kuat

tersebut meliputi : ekonomi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya, politik dan pertahanan dan keamanan sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk menciptakan kerangka landasan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN tersebut, perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberikan rangsangan serta peluang seluas-luasnya bagi semua potensi pembangunan untuk berpartisipasi dalam usaha pembangunan nasional dengan mengusahakan keseimbangan dan keserasian pembangunan dipelbagai bidang, yakni pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, agar pembangunan lebih merata diseluruh tanah air, untuk itu pemerintah, memberikan bantuan terhadap pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden R.I No.6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa, sebagai berikut :

"Bahwa dalam rangka usaha mencapai keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah,, pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan di masing-masing daerah, peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daera, peningkatan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, peningkatan kesadaran dan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan dan memelihara sumber alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat, serta peningkatan kelancaran perhubungan dalam rangka pengembangan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab, perlu memberikan bantuan pembangunan kepada

Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa" (Anonim, 1984 : 1).

Dari uraian tersebut, maka tujuan pemberian bantuan pembangunan, khususnya untuk bantuan pembangunan daerah Tingkat II adalah :

- a. Untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.
- b. Digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lainnya ada daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting, sebab tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, maka setiap kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sudah barang tentu tidak dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Untuk kesadaran masyarakat sangat diharapkan untuk turut aktif dalam setiap pelaksanaan pemerintah, terutama dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, sebab merupakan kunci pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Dilain pihak proses pembangunan itu dapat juga menimbulkan perluasan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Bintoro jokroamijojo, (1985 : 225 - 226) sebagai berikut :

"... Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi. Misalnya dengan pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja, dan adanya kesempatan itu, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat di dalamnya, adalah bentuk partisipasi yang paling dasar".

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa proses pembangunan itu tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat. Namun sekarang ini yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasinya, yaitu ada atau tidaknya partisipasi masyarakat secara sukarela dan bergairah dalam pembangunan serta bagaimana menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, sebab partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas dalam pelaksanaan pembangunan, melainkan juga dalam proses perencanaan dan pengawasannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti yang terlihat dalam pelita IV yaitu :

- a. Secara bertahap membebaskan semua desa dari keterpencilan dengan pembangunan prasarana perhubungan yang dapat memperlancar hubungan desa dengan desa,

desa dengan kecamatan dan kecamatan dengan kota-kota lain.

- b. Menata kembali daerah-daerah yang terlalu padat penduduknya
- c. Meningkatkan mutu aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan administrasi pemerintah bagi kelancaran pembangunan, khususnya pembangunan daerah serta dapat mendorong penduduk untuk berprakarsa dalam pembangunan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan .
- d. Menggerakkan koordinasi terhadap semua program pembangunan daerah.
- e. Memberikan bantuan terhadap pembangunan daerah untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Namun demikian telah berbagai kebijaksanaan kebijaksanaan dan langka-langka yang ditempuh, tetapi kenyataan sekarang ini masalah-masalah yang dihadapi daerah dan perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Masih terdapat desa-desa yang terpencil atau terisolasi dari pusat-pusat pembangunan, seperti Desa Matangnga di Kecamatan Sumarorong yang hanya dapat dilalui dengan memakai kuda.
- b. Lembaga-lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.

c. Tingkat kesadaran dan ketrampilan penduduk belum memadai, menyebabkan produktifitas dan pendapatan masyarakat masih rendah.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah seperti di atas, maka terdoronglah penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Tingkat II Polmas (Kasus Proyek Pembangunan Inpres Desa Pelita IV).

B. Rumusan Masalah

Seperti diketahui bahwa pembangunan itu tidak lain adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang terencana. Oleh karena itu pembangunan berarti membentuk suatu masa depan dengan proses perubahan dari keadaan yang kurang baik, ke keadaan yang lebih baik. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, teratur dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih sistimatis.

Bila hal tersebut dapat dihayati dengan baik oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat, maka pembangunan daerah dalam pelaksanaannya tak akan mendapat hambatan, tapi kenyataannya sebagian besar daerah-daerah masih diperhadapkan pada berbagai masalah-maslah seperti yang dipaparkan dalam pembahasan latar belakang masalah.

Keadaan ini juga dialami oleh Kabupaten Polmas, di mana proses pembangunan daerah yang dilaksanakan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti masalah geografis, masalah ekonomi dan masalah sosial. Dari segi pelaksanaannya masih kurangnya tenaga kerja terampil serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, masih rendah .

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan Daerah Tingkat II Polmas tersebut, maka untuk lebih sistimatisnya penulis skripsi ini, perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun masalah-masalah yang penulis akan soroti dalam penelitian ini, dapat dilihat pada rumusan masalah berikut :

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah Tingkat II Polmas.
- b. Bagaimana hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dalam rangka penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah berbagai aspek yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Tingkat II Polmas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hasil-hasil yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas selama Pelita IV, khususnya mengenai Batuan Inpres Desa.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan input bagi Daerah Tingkat II Polmas dalam rangka lebih sempurnanya pelaksanaan pembangunan berikutnya, serta dapat lebih menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.
- b. Khususnya masyarakat Kabupaten Polmas, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasinya yang lebih tinggi, agar dapat menghayati betapa pentingnya pembangunan itu, sehingga tergugah untuk ikut dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan .
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi yang memerlukannya.
- d. Khusus bagi penulis dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui teori-teori tentang

pembangunan serta juga dapat mengetahui mengenai tingkat partisipasi masyarakat Polmas dalam proses pembangunan.

D. Kerangka Teori

Untuk pemerataan pembangunan keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Untuk mencapai usaha tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan jalan memberikan bantuan, yakni kebijaksanaan Inpres Bantuan Desa yang diberikan kepada daerah-daerah pada setiap tahun anggaran. Kebijaksanaan tersebut dimulai pada repelita pertama. Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena terpenuhinya kebutuhan mereka dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana.

Selain tujuan pemberian bantuan Inpres tersebut, juga ditujukan untuk merangsang masyarakat agar turut serta dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, sebab masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, melainkan juga sebagai subyek pembangunan. Untuk nilai-nilai atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat perlu didorong agar dapat bernilai positif terhadap kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan uraian sebagai berikut :

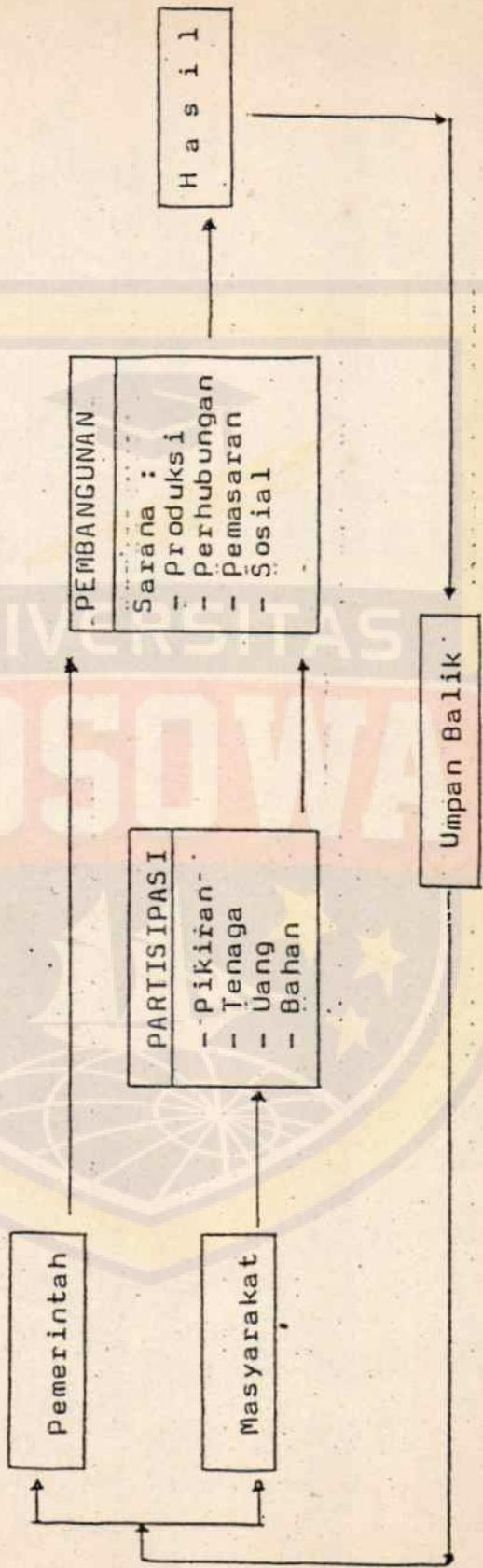
"Bahwa institusi-institusi kemasyarakatan seperti gotong royong, pemufakatan, permusyawaratan dan lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai

positip dari institusi itu dapat berkembang dan untuk kehidupan nasional pada umumnya " (I Nyoman Beratha, 1982 : 71).

Dari uraian tersebut, nampak jelas bahwa pembangunan itu dapat berjalan lancar apabila didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar memberikan partisipasinya. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemerintah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan bagaimana masyarakat memberikan partisipasinya, dapat dilihat pada diagram pada halaman berikut .

BOSOWA





Dari diagram tersebut, nampak bahwa pemerintah dalam era pembangunan dewasa ini, dalam upaya merangsang masyarakat untuk turut serta dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, maka disiapkan berbagai sarana-sarana pembangunan agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam rangka penulisan karya ilmiah ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang ilmiah pula agar data yang diperoleh dapat lebih sempurna dan terarah secara sistematis.

Sejalan dengan itu, maka dalam proses penelitian penulis mempergunakan dasar penelitian kasus dengan tipe penelitian eksploratif, hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan dasar dan tipe penelitian tersebut, maka dalam pengumpulan data penulis mempergunakan metode penelitian lapang yang dirangkaikan dengan studi kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian lapang, penulis terjun di lokasi penelitian, yakni Kantor Bupati Polmas dan beberapa Kecamatan guna mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder.

Sesuai kedua metode penelitian tersebut, maka penulis dalam proses penelitian mempergunakan berbagai teknik-teknik antara lain :

1. Teknik pengumpulan data

Sejalan dengan penelitian lapangan yang penulis lakukan, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan antara lain :

a. Interview (Wawancara)

Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden (pemerintah) yang dapat memberikan informasi, atau keterangan-keterangan tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk lebih mendukung jawaban-jawaban yang diperoleh melalui kuesioner.

b. Kuesioner

Untuk teknik ini penulis membagikan daftar pertanyaan (angket) terhadap responden yang telah ditentukan, data ini nantinya sebagai salah satu bahan analisa.

2. Teknik penarikan sampel

a. Sampel lokasi

Adapun sampel lokasi penelitian ini adalah

Kabupaten Polmas, yang meliputi 9 Kecamatan. Mengingat luasnya lokasi penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu mengambil sampel lokasi penelitian dengan sasaran wilayah kecamatan yang dinilai berhasil baik, sedang berhasil dan kurang berhasil dalam pembangunan, Sebab dengan demikian dapat dianggap telah mewakili seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Polmas. Adapun ke tiga kecamatan yang dipilih adalah :

1. Kecamatan Wonomulyo sebagai kecamatan yang berhasil baik.
2. Kecamatan Polewali sebagai kecamatan yang sedang keberhasilannya.
3. Kecamatan Sumarorong sebagai kecamatan yang kurang berhasil.

b. Sampel responden

Mengingat populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini meliputi pemerintah dan masyarakat . Untuk itu penulis perlu mengadakan sampel terhadap populasi yang akan menjadi responden dalam penelitian. Adapun teknik yang penulis pergunakan dalam menentukan responden adalah teknik purposive sampel yaitu menentukan atau menunjuk langsung yang akan menjadi obyek dalam penelitian . Jumlah dari responden yang penulis pilih adalah 80 orang.

dengan perincian sebagai berikut :

1. Wawancara dengan pejabat : 20 orang
 2. Pengisian kuesioner
 - Kecamatan Wonomulyo : 30 orang
 - Kecamatan Polewali : 18 orang
 - Kecamatan sumarorong : 12 orang
- Jumlah : 80 orang

3. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan penulis menganalisa secara kuantitatif, tetapi namun demikian tetap memperhatikan analisa secara kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai gambaran umum atau garis-garis besar yang dituangkan dalam skripsi ini.

Bab pertama yaitu ; pendahuluan, dimana dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dengan thema, Tinjauan pustaka, yang menguraikan beberapa pengertian, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tujuan penyaluran dan Inpres

Bantuan Desa.

Bab ketiga, penulis memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dengan uraian letak dan keadaan geografis, keadaan demografi, pola umum pembangunan daerah dalam Repelita IV dan bentuk swadaya murni masyarakat .

Bab keempat ini, penulis membahas dan menganalisa hasil penelitian yang berisi ; partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, kemudian hasil-hasil yang dicapai dan faktor-faktor penghambat.

Dan pada bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, di mana pada bab ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini, kemudian dari hasil kesimpulan tersebut penulis mengemukakan beberapa masalah yang relevan dengan tindak lanjut, untuk itu penulis memberikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Partisipasi

Pengertian partisipasi berasal dari bahasa asing yaitu "participation" yang berarti mengikutsertakan pihak lain. Namun demikian, pengertian partisipasi yang lebih jelas seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1985 : 224) sebagai berikut :

"Partisipasi adalah suatu kegiatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan atas dasar kesuka-relaan tetapi juga seringkali karena pola kekuasaan dan iklim tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi, yaitu gotong royong. Pada dasarnya gotong royong tersebut adalah berdasarkan kesuka-relaan, saling membantu bekerja untuk sesuatu kegiatan yang menyangkut kepentingan sebagian anggota atau kepentingan seluruh anggota masyarakat. Ikatan kemasyarakatannya adalah ikatan tempat ataupun berdasar atau suatu ikatan tradisional lain. Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan dengan cara gotong royong".

Selain pengertian tersebut, pengertian partisipasi juga terdapat dalam diktat "Bunga Rampai Administrasi Pembangunan" sebagai berikut :

"Partisipasi ialah sikap tanggap masyarakat lokal (local response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan pembangunan" (M. Syukur Abdullah, 1987:76).

Dari kedua pengertian tersebut, nampak bahwa partisipasi itu tidak lain dari sikap masyarakat. Bila dikaitkan dengan proses pembangunan, maka sikap masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilaksanakan, yang mana masyarakat itu secara sukarela turut serta di dalamnya.

2. Masyarakat

Mengenai pengertian masyarakat, banyak para ahli memberikan batasan seperti halnya yang dikemukakan oleh M. Said Saggaf (1975:3) sebagai berikut :

"Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu yang mempunyai perasaan bersatu, terikat pada nilai-nilai sekelompok sosialnya mempunyai kesadaran bahwa hanya dengan hidup demikian itu kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang pokok dapat dipenuhi".

Bila ditelaah dari pengertian tersebut, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai sejumlah manusia .
- b. Mempunyai tempat tertentu.
- c. Mempunyai tata cara pelayanan lembaga yang sama.
- d. Mempunyai warisan sosial yang sama.
- e. Mempunyai rasa kesatuan.
- f. Dapat memecahkan problema bersama berdasarkan rasa kesatuan

Dengan demikian bila dilihat dari pengertian partisipasi dan masyarakat tersebut, maka partisipasi

masyarakat adalah tidak lain dari pada keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan demi untuk kepentingan bersama.

3. Pembangunan Daerah

Sebelum dijelaskan mengenai arti dari pembangunan daerah, untuk jelasnya terlebih dahulu perlu diketahui arti dari pembangunan itu. Dimana S.P.Siagian(1983:2-3) memberi batasan sebagai berikut:

"Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara oleh atau suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

Lebih lanjut dipaparkan juga pengertian pembangunan dalam buku "Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa" sebagai berikut :

"Bahwa pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya"(I.nyoman Beratha, 1982:65).

Bila ditelaah dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu adalah merupakan suatu proses kegiatan yang mana secara sadar dilaksanakan dan secara terencana dimana berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan untuk menuju kearah modernisasi.

Sedang pengertian daerah seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1974,

entang pokok-pokok Pemerintahan di daerah disebutkan bahwa :

"Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anonim, 1974:12).

Bila dilihat pengertian pembangunan dan pengertian daerah tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan daerah adalah kegiatan pembangunan dalam arti luas, yang mencakup kegiatan yang bersumber dari APBN (sektoral), APBD, bantuan Inpres/program lainnya dan pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Tujuan

Dalam rangka pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional tersebut, oleh karena itu landasan dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah tidak boleh saling bertentangan, tetapi harus saling menunjang. Untuk pola dasar pembangunan daerah disusun dengan berdasarkan pada GBHN dan disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Berdasar dari uraian tersebut, bila ditinjau dari sudut daerah, maka tujuan pembangunan yang dilaksanakan sekarang adalah :

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat
- c. Perluasan kesempatan kerja.
- d. Melaksanakan landasan yang kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya.
- e. Memantapkan dan mengembangkan potensi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus tetap memperhatikan pembinaan seluruh nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. Karena itu kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai pembangunan daerah harus menunjang peningkatan pembinaan kesatuan ekonomi tersebut, seperti :

- a. Kebijakan pembukaan wilayah-wilayah potensial yang dapat dijadikan daerah-daerah pertanian dan perkebunan, dalam rangka peningkatan produksi dengan penyediaan sarana produksi dan pemasaran.
- b. Mengusahakan peningkatan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung proses pertumbuhan ekonomi dengan melalui intensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Kebijakan dari segi pendekatan regional, sub-

sub wilayah pembangunan yang telah ditetapkan pada arah pembangunan jangka panjang perlu ditetapkan pembagiannya lebih lanjut kedalam wilayah ekonomi dan wilayah unit desa untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar kecamatan, desa dan antar desa dengan kota.

d. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain.

Pembangunan daerah sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, dituangkan dalam repelita masing-masing daerah yang berisi tujuan, asas, landasan, sasaran dan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan dengan berpedoman kepada pola dasar pembangunan daerah, sedangkan untuk setiap tahun disusun program tahunan sebagai pelaksanaan dari repelita masing-masing daerah.

Agar supaya kegiatan pembangunan nasional dan daerah itu terpadu dengan baik, pemerintah daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri dari pola dasar pembangunan lima tahun, repelita daerah dan program pembangunan tahunan.

2. Sasaran

Dalam rangka peningkatan pemerataan peningkatan penyebaran pembangunan nasional diseluruh wilayah agar terjadi keselarasan laju pertumbuhan antara daerah serta memperkuat kesatuan nasional dengan meningkatkan ikatan ekonomi dan sosial antar wilayah, maka diharapkan se-

mangat dan gairah partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing akan semakin meningkat.

Pembangunan di daerah mencakup seluruh kegiatan pembangunan, baik kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh instansi-instansi vertikal di daerah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (pemerintah Daerah Tingkat I, pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah desa) maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dari seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, perlu diserasikan dan dikoordinasikan untuk dapat mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah yang bersangkutan. Di samping itu kegiatan pembangunan juga ditujukan untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah. Di antara masalah-masalah tersebut yang mendapat perhatian khusus adalah masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah kumuh, daerah-daerah yang relatif terkebelakang, daerah terpencil, daerah pedesaan, daerah perkotaan dan keserasian antara pembangunan kota dan daerah pedesaan disekitarnya.

Untuk meningkatkan keserasian antara pembangunan sektoral dan regional sampai ketingkat desa serta merangsang partisipasi daerah dalam pembangunan. Untuk

itu pemerintah Pusat memberikan bantuan pembangunan kepada berbagai tingkat pemerintahan di daerah, yaitu mulai dari program bantuan pembangunan Daerah Tingkat II, Program Pembangunan Daerah Tingkat I dan Program bantuan Ipres. Pemberian bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong daerah untuk mempercepat laju pertumbuhan serta perkembangan daerahnya masing-masing dengan membangun bermacam-macam proyek, baik pembangunan ekonomi, sosial, budaya maupun prasarana perhubungan yang dianggap paling mendesak di daerahnya.

Setiap tahap pembangunan sejak repelita I sampai sekarang selalu diarahkan pada sasaran ganda, yaitu selain diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, juga diarahkan untuk meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya, sebagai bagian dari rangkaian tahap pembangunan. Sehingga dengan demikian maka Repelita IV adalah merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan daripada Repelita III.

Apabila tujuan pembangunan telah ditetapkan, maka perlu ditentukan dengan jelas sasaran-sasaran yang harus dicapai, kemudian diketahui kearah mana gerak pembangunan harus diambil.

Berdasarkan pada hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan bangsa yang semakin meningkat dalam

repelita-repelita sebelumnya, maka sasaran-sasaran dari pada pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam repelita IV meliputi :

- a. Memacu pada pencapaian sasaran pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di daerah.
- b. Pelaksanaan pembangunan di daerah dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip berkelanjutan yang mensyaratkan setiap daerah harus mengandalkan sumber dan potensi yang dimiliki sebagai sumber pertumbuhan.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dengan sebaik-baiknya dimasing-masing daerah.

Berdasarkan dari sasaran pembangunan daerah tersebut, maka dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diperlukan adanya kerjasama yang erat antar daerah dalam suatu wilayah dan antar wilayah, sebab walaupun lokasi kegiatan-kegiatan pembangunan berada ditempat lain akan tetapi dapat berpengaruh kepada beberapa daerah dalam satu propinsi ataupun anatar propinsi.

C. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Seperti telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu, bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu

keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik, maka diperlukan suatu pendekatan yang bersifat integral. Karena pendekatan terhadap pembangunan dalam satu bidang misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi saja, tidak memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinyu, sebab sebagai suatu sistim maka perubahan ekonomi tidak dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diinginkan, kalau tidak diimbangi oleh keseluruhan perubahan dalam masyarakat, yang mana merupakan persyaratan bagi perubahan ekonomi.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Tapi namun demikian supaya perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, maka perlu didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul dan berkembang didalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian pembangunan itu bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan juga didukung oleh partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, sebab partisipasi tersebut sangat penting dalam berhasilnya suatu proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M.Syukur Abdullah (1987 : 75) sebagai berikut :

"Jika pembangunan (nasional atau daerah) dapat diartikan sebagai proses perubahan berencana yang dilaksanakan atas dorongan, prakarsa dan dukungan pemerintah yang dilaksanakan oleh warga masyarakat, maka partisipasi menjadi amat penting untuk berhasilnya suatu proses pembangunan".

Dari uraian tersebut nampak bahwa partisipasi menjadi masalah pokok, karena tanpa keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan atau kurang tanggap terhadap program-program pembangunan, maka tujuan pembangunan sulit tercapai. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dikemukakan dalam buku "pokok-Pokok Pengertian tentang Lembaga Sosial Desa dan Usaha-Usaha Pengembangannya" berikut ini:

"Kegiatan partisipasi adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir dan cara bekerja" (Anonim, 1975:7-8).

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu ada, sesuai dengan hakekat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahannya, bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan dari pemerintah. Dengan demikian arti pembangunan dalam kerangka partisipasi masyarakat ialah membangun manusia-manusia agar memiliki kepribadian, jujur dan berdedikasi serta berorientasi kepada

pembangunan.

Dalam rangka menciptakan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa serta swadaya masyarakat, diperlukan peningkatan pemantapan tata cara pembangunan yang lebih terpadu, baik ditingkat kecamatan dilaksanakan melalui sistim UDKP. Hal ini perlu lebih ditingkatkan, sehingga melalui wahana UDKP seluruh kegiatan pembangunan dapat dipadukan dengan peran serta masyarakat sekaligus memperoleh kesempatan dalam hal pembiayaan, baik yang bersumber dari swadaya murni, APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, Inpres dan dana-dana lain yang syah. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan dari pemerintah berupa bantuan teknis maupun stimulan melalui Inpres dan dana sektoral serta memungkinkan pemberian peluang untuk menggali sumber-sumber lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah.

Adaya maksud diciptakannya iklim yang mendorong berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat adalah :

- a. Terbatasnya dana dari pemerintah untuk membiayai pembangunan yang sangat banyak jenisnya.
- b. Terdapat berbagai potensi dan sumber daya pembangunan di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pembangunan masyarakat setempat.
- c. banyak masalah yang ada di dalam masyarakat dapat

dipecahkan secara swadaya.

- d. Kesadaran dan kemampuan masyarakat membangun secara swadaya sudah meningkat cukup tinggi.
- e. Masyarakat bukan saja sebagai obyek pembangunan, melainkan juga merupakan subyek pembangunan yang berkewajiban melaksanakan pembangunan.
- f. Lebih mendorong terciptanya tujuan pembangunan dengan meningkatkan ketahanan nasional di daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Program-program tersebut diatas, diharapkan dapat memberrikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana pembangunan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

Pada hakekatnya partisipasi dalam pembngunan lebih dapat terselenggara dalam masyarakat apabila rakyat merasa berpartisipasi dalam pormulasi arah dan cara pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapatnya keseimbangan mengenai pemetikan hasil pembangunan. Dari kedua keikutsertaan masyarakat tersebut, sering disebut sebagai pemerataan dalam memikul beban pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dilain pihak partisipasi itu sangat penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan

pembangunan itu sendiri, sebab dengan terlibatnya atau tergerakannya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi, maka diharapkan pembangunan disegala sektor dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan itu sendiri.

D. Tujuan Penyaluran Dana Inpres bantuan Desa

Dengan melihat perkembangan pembangunan pedesaan di Indonesia sesuai dengan apa yang digalakkan oleh pemerintah dewasa ini, dimana merupakan salah satu asas pemerataan pembangunan, baik pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek.

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah telah menyediakan dana yang khusus untuk pembangunan desa, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang disalurkan ke desa-desa/kelurahan, yang diterima langsung oleh kepala desa/kelurahan dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II, melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang mana dikatakan bahwa :

"Pada dasarnya penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berjalan. Apabila tahun anggaran berakhir dan masih terdapat Bantuan Pembangunan Desa yang belum disalurkan, maka untuk perpanjangan waktu penyaluran diperlukan izin dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul tertulis Bupati/Walikota/daerah Kepala daerah Tingkat

II yang bersangkutan" (Anonim, 1984 : 21-22).

Dengan adanya dana Inpres Bantuan Desa tersebut, maka pemerintah mengharapkan dapat merangsang atau mendorong masyarakat, sehingga mereka ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desanya (Anonim, 1984 : 16). Untuk itu tujuan dari penyaluran dana Inpres Bantuan Desa tidak lain merupakan rangsangan dari masyarakat pedesaan agar dapat membangun desanya, yang nilai dari pembangunan tersebut jauh lebih besar dari dana Inpres Bantuan Desa . dalam arti bahwa pemerintah mengharapkan, agar pembangunan di pedesaan sebahagian besar dananya berasal dari desa itu sendiri.

Dengan demikian maka secara tidak langsung, pemerintah dan masyarakat desa dipacu untuk menggali semua potensi yang ada di desanya, sebagai sumber dana yang terbesar dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Keadaan Geografis

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai keadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dari segi keadaan geografisnya, terlebih dahulu penulis memberikan pengertian apa itu geografi. Menurut P.J. Bouman (1976 : 81) bahwa :

"Seluruh keadaan kosmis dan sekitarnya serta yang tidak (belum) dipengaruhi atau diubah karena keaktifan manusia itu, atau dengan kata lain geografi adalah keadaan total disekitar manusia yang dikurangi dengan segala faktor yang langsung diadakan atau dirubah oleh manusia".

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka pengaruh geo-grafi itu selalu bersifat relatif, yang tergantung kepada taraf perkembangan dan oleh karena itu keadaan geografis Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dapat dilihat dari uraian berikut .

Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas bila dilihat dari segi fisiknya, maka daerahnya dapat dikatakan sebagai daerah tiga dimensi yaitu daerah yang terletak di daerah daratan, daerah pengunungan dan sebagai daerah pantai. Kabupaten Daerah Tingkat II polmas ini, adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tator.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.

Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas mempunyai luas Daerah sekitar 4781,5 km², yang terletak disebelah utara Kotamadya Ujung Pandang, dengan jarak ± 247 Km. Adapun perincian dari luas daerah Kabupaten Polmas tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

PERINCIAN LUAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Tinambung	106,31
2.	Campalagian	244,43
3.	Wonomulyo	541,64
4.	Polewali	298,23
5.	Sumarorong	574,96
6.	Mambi	1.206,50
7.	Mamasa	652,98
8.	Pana	571,20
9.	Tutallu	585,25
Jumlah		4.781,52

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kab. Polmas Tahun 1991.

Dari tabel 1 tersebut, nampak bahwa kecamatan yang terluas wilayahnya adalah berturut-turut; Kecamatan mambi dengan luas wilayah 1.206,50 Km², kemudian kecamatan Mamasa dengan luas wilayahnya 652,98 Km², kemudian Kecamatan Tutallu dengan luas wilayahnya 585,25 Km²,

kemudian Kecamatan sumarorong dengan luas wilayah adalah 574,96 Km², kemudian Kecamatan Pana dengan luas wilayahnya 571,20 Km², kemudian Kecamatan Wonomulyo dengan luas wilayahnya 541,64 Km², kemudian Kecamatan Polewali dengan luas wilayahnya 298,23 km², kemudian Kecamatan Campalagian dengan luas wilayahnya 244,43 Km² dan yang menempati urutan terakhir adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayahnya adalah 106,31 Km².

B. Keadaan Demografi

Penduduk adalah merupakan salah satu masalah yang dihadapi sekarang ini, baik dari segi pertumbuhannya maupun dari segi penyebarannya. Akan tetapi dilain pihak penduduk itu merupakan modal utama dalam proses pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten daerah Tingkat II Polmas berdasarkan hasil penelitian, maka penduduknya sampai dengan tahun 1989 mencapai 397.169 orang. Tetapi untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan keadaan penduduk perkecamatan selama dalam Repelita IV sebagai berikut :

1. Keadaan penduduk menurut perkembangannya

Keadaan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, dimana setiap kecamatan terlihat mengalami perkembangan se tiap tahunnya. Tetapi perkembangan ter-

sebut bervariasi, ada kecamatan yang cepat laju pertumbuhan penduduknya dan ada pula yang lambat. Namun demikian untuk dapat mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS
MENURUT PERKEMBANGAN TIAP KECAMATAN DALAM
TAHUN 1985 S/D 1989 (DALAM JIWA)

No. Kecamatan	1985	1986	1987	1988	1989
1. Tinambung	54949	6921	7221	57380	58055
2. Campalagian	59815	1176	1723	62121	62565
3. Wonomulyo	77496	1076	1272	81614	81829
4. Polewali	70012	0479	0479	71124	72014
5. Sumarorong	15255	6146	6236	17451	17554
6. Mamasa	31095	1219	1259	32405	33480
7. Mambi	32244	2318	2376	32767	32857
8. Pana	13897	4468	4754	15020	14573
9. Tutallu	20486	1083	1217	21468	21598
Jumlah	76486	4886	7188	392240	397168

Sumber : Kantor statistik Kabupaten Polmas, Tahun 1991.

Dengan melihat tabel di atas, nampak bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, pada umumnya disetiap kecamatan dari tahun ke tahun penduduknya selalu meningkat, kecuali di Kecamatan Sumarorong pada tahun 1986 dan di Kecamatan Pana pada tahun 1989 mengalami penurunan.

Kemudian dalam II juga nampak bahwa Kecamatan yang tertinggi jumlah penduduknya adalah Kecamatan wonomulyo, kemudian kecamatan Polewali di susul Kecamatan

Campalagian, Selanjutnya Kecamatan Tinambung, kemudian Kecamatan Mamasa, disusul Kecamatan Mambi, selanjutnya Kecamatan Tutallu, kemudian Kecamatan Sumarorong dan yang menempati urutan terakhir (yang paling sedikit penduduknya) adalah Kecamatan Pana.

Selanjutnya dengan mealihat data yang tersaji pada tabel II tersaebut, mmaka dapat disimpulkan bahwa tingkat prosentase rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya dariu tahun 1985 samapi dengan tahun 1989 di Kabupaten Daerah Tingkata II Polmas adalah 1,35%.

2. Keadaan Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam tahun 1989 secara keseluruhan sebanyak 397.169 jiwa, dimana atersebar pada 9 Kecamatan, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih rendah yaitu 192.015 jiwa dari pada jumlah penduduk perempuan yaitu 205.154 jiwa.

Untuk lebih jelasnya perincian dari masing-masing jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio setiap kecamatn di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS, TAHUN 1989
(Dalam Jiwa)

No. Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex ratio
	Laki-laki	Perempuan		
1. Tinambung	26127	31928	58055	81,83
2. Capalagian	30351	32314	62565	93,83
3. Wonomulyo	39792	42037	81824	94,66
4. Polewali	35844	38064	73908	94,17
5. Sumarorong	9033	8521	17554	100,01
6. Mambi	16394	16463	32857	99,58
7. Mamasa	16738	16742	33480	99,98
8. Pana	7062	7511	14573	92,02
9. tutallu	10399	11199	21598	92,86
Jumlah	192015	205154	397169	93,60

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Polmas, Tahun 1991.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 1989 rata-rata kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, kecuali kecamatan Sumarorong. Dengan demikian otomatis jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, juga dapat dilihat dari sex ratio penduduk untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas yakni 93,60.

C. Pola Umum Pembangunan Daerah dalam Repelita IV

Dengan berakhirnya pelita III, maka perlu ditetapkan landasan dari pentusunan repelita IV Kabupaten Daerah Tingkat ii Polmas . Hqal ini sejalan dengan pola umum pembangunan daerah jangka panjang, maka perlu adanya

landasan yang memberi pedoman dan arah setiap tahapan pelaksanaannya.

Pola umum repelita IV Daerah Tingkat II Polmas adalah Program Pembangunan Sektorial dan Pembangunan Daerah dengan pe-nekanan sesuai dengan potensi yang ada, sebagai pelaksanaan program nasional dan regional yang terpadu. Karena repelita daerah IV adalah kelanjutan repelita III daerah, baik yang belum dimulai pelaksanaannya, akan dilanjutkan dan dilaksanakan serta dikembangkan dalam pelita IV.

1. Arah dan Kebijaksanaan

- a. Pertumbuhan ekonomi mendapat perhatian utama dalam rangka peningkatan pendapatan dan araf hidup masyarakat Polmas khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
- b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk lebih mempertebal kesadaran rakyat terhadap rasa keterikatan, rasa memiliki dan rasa keikut-sertaan secara aktif serta menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab nasional dengan dukungan partisipasi sosial dari seluruh potensi pembangunan secara terarah dan positif.
- c. Untuk memantapkan stabilitas politik di Daerah Tingkat II Polmas diusahakan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta semakin tegak tumbuhnya

kehidupan konstitusional, demokratis berdasarkan hukum. Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4) harus semakin digalakkan dan dimasyarakatkan seluruh lapisan masyarakat, agar benar-benar menjadi pedoman tingkalaku yang hidup dalam masyarakat.

Kekuatan-kekuatan sosial politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kekuatan-kekuatan sosial politik tersebut termasuk ABRI, hendaknya secara bersama-sama mengusahakan dan memantapkan suasana kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang disemangati oleh rasa kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- d. Dalam Pelita IV perluasan kesempatan kerja merupakan ke-butuhan yang tetap mendapat perhatian melakalui kebijaksanaan yang komprehensif seperti latihan ketrampilan, perluasan lapangan usaha serta program-program khusus yang banyak menyerap tenaga kerja.
- e. Usaha-usaha Pembangunan pedesaan merupakan bahagian yang terpadu dengan pembangunan sektor pertanian. Dalam hal ini perlu diperhatikan koordinasi dengan seluruh kegiatan masyarakat pedesaan itu sendiri

- sehingga tercipta pembangunan pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan itu sendiri.
- f. Dalam pembangunan pedesaan perlu pembukaan sarana perhubungan dalam rangka menggerakkan daya dan dana masyarakat untuk maksud tersebut, pelaksanaannya dilakukan secara konseptual dengan titik berat pada peningkatan golongan ekonomi lemah.
 - g. Usaha untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah antara lain nelayan dan pengrajin untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dengan jalan memperkuat permodalan, peningkatan keahlian dan kemampuan serta memperluas pemasaran, untuk lebih mendorong berpartisipasi dalam masyarakat dalam masyarakat pembangunan.
 - h. Usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kegiatan Bimas, Inmas, Insus multiplecroasing, diverifikasi dengan penanamantanaman ekspor/industri hortikultura, untuk itu perlu diteliti komoditi yang sesuai dengan kondisi daerah dan iklim setempat serta prospek pemasaran, baik dalam maupun luar negeri.
 - i. Usaha dibidang ke Agrariaan diarahkan kepada pelaksanaan catur tertib hukum pertahanan, meliputi:

- Pelaksanaan yang lebih mantap Undang-Undang Pokok Agraria
 - Tertib administrasi
 - Tertib penggunaan tanah.
 - Tertib pemilikan tanah dan lingkungan hidup.
- j. Usaha-usaha pembukaan wilayah potensial yang dapat dijadikan daerah-daerah pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produksi dengan penyediaan sarana produksi dan pemasaran
- k. Usaha-usaha pemukiman kembali penduduk yang masih hidup terpencar-pencar untuk lebih mudah pembinaan menuju masyarakat yang lebih maju.
- l. Usaha-usaha peningkatan peranan BUUD/KUD serta koperasi primer akan terus dimantapkan melalui peningkatan kemampuan aparat, organisasi dan permodalan .
- m. Usaha-usaha pembangunan perumahan sehat yang harganya terjangkau oleh masyarakat melalui program pembangunan Perumahan Nasional, maupun oleh Bank Tabungan Negara dengan kerjasama dengan pihak swasta.
- n. Usaha-usaha pembangunan fasilitas pendidikan, baik Pendidikan Dasar maupun sekolah Kejuruan, SMTP, SMTA dan Perguruan Tinggi.
- o. Usaha-usaha pembangunan fasilitas Kesehatan untuk

- peningkatan pelayanan kesehatan dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat serta penyuluhan kesehatan dan gizi.
- p. Usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan Daerah dalam rangka mendukung proses pertumbuhan ekonomi dengan melalui intensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.
- q. Pembinaan peningkatan Aparatur Pemerintah diarahkan kepada kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta menegakkan dan memperlancar pelaksanaan daerah. Dalam suasana pembangunan dewasa ini dibutuhkan aparat pemerintah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, bersih, cakap dan bertanggung jawab.
- r. Usaha-usaha meningkatkan aparat Pemerintah Desa, agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan Administrasi Daerah yang makin tertib dan efektif.
- s. Usaha-usaha meningkatkan hubungan fungsional secara timbal balik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah.
- t. Usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemampuan daerah dan masyarakat untuk memperluas tersedianya sarana dan prasarana sosial budaya, antara lain dibidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, olah raga, pembinaan generasi muda dan peranan wanita.

- u. Dari segi pendekatan regional, sub-sub wilayah pembangunan yang telah ditetapkan pada arah pembangunan jangka panjang, perlu ditetapkan bagiannya lebih lanjut ke dalam wilayah ekonomi unit desa auntuk mencapai keseimbangan pembangunan antar kecamatan, Desa dan antar Desa dengan Kota.

2. Prioritas pembangunan daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam Repelita IV diprioritaskan kepada :

- a. Usaha peningkatan produksi tanaman pertanian termasuk aquaculture sesuai dengan ekologi masing-masing Su Wilayah, dimana Su Sektor Pertanian tanaman pangan dan perkebunan akan mendapat perhatian utama.
- b. Usaha pemeliharaan, peningkatan dan perluasan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.
- c. Peningkatan pendayagunaan pengairan dan prasarananya.
- d. Usaha peningkatan Infustri kecil dan industri-industri lainnya yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
- e. Meningkatkan pembangunan dan pembinaan pedesaan pada umumnya.
- f. Peningkatan usaha reboisasi dan penghijauan dalam rangka pemantapan fungsi hidro orologis dan kelestari-

an lingkungan.

- g. Usaha penataan Sub-sub Wilayah dan pemukiman sehingga terdapat keserasian dan keterpaduan antara manusia dan kegiatannya serta antara manusia dengan lingkungannya.

D. Bentuk Swadaya Murni Masyarakat

Selain keikutsertaan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, juga masyarakat dapat melaksanakan sendiri pembangunan tersebut, yang mana dikenal dengan swadaya murni masyarakat. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan pembangunan tanpa bantuan dana dari pemerintah, sehingga pembangunan itu dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh masyarakat.

sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa jenis proyek pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas yang dilaksanakan melalui swadaya murni masyarakat. Proyek-proyek tersebut meliputi; sarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial. Namun demikian untuk dapat mengetahui jumlah proyek swadaya murni masyarakat di Kabupaten daerah Tingkat II Polmas, dapat dilihat pada tabel IV.

Dalam tabel IV, terlihat bahwa pada umumnya dari tahun ke tahun jumlah dana swadaya murni masyarakat yang diserap selalu meningkat, kecuali dalam tahun anggaran 1987/1988 jumlah dana swaya murni masyarakat di Kabupaten

Daerah Tingkat II Polmas menurun. yakni pada tahun anggaran 1986/1987 jumlah dana dari swadaya murni masyarakat adalah Rp. 561.818.860 turun menjadi Rp. 344.054.000, pada tahun anggaran 1987/1988.

Terjadinya penurunan ini,, disebabkan karena dalam tahun anggaran 1987/1988 tersebut di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas terjadi banjir besar, sehingga sebagian dari dana masyarakat dialihkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana dari kebutuhan rumah tangganya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV berikut:



BOSOWA

TABEL IV

PROYEK-PROYEK SWADAYA MURNI MASYARAKAT DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II POLMAS DALAM PELITA IV

No. Thn ang- garan	Jenis Pro- yek	Jumlah proyek	Biaya (Rp)	Tenaga Kerja (orang)
1. 1984/1985	Produksi	19	24.600.000	68.400
	Perhubungan	84	114.305.000	302.400
	Pemasaran	75	5.400.000	270.000
	Sosial	38	38.850.000	136.000
	J u m l a h	146	178.155.000	777.600
2. 1985/1986	Produksi	20	82.932.750	72.000
	Perhubungan	34	66.437.000	122.400
	Pemasaran	15	7.526.550	18.000
	Sosial	111	111.754.700	396.600
	J u m l a h	170	268.695.000	629.000
3. 1986/1987	Produksi	26	50.752.700	81.600
	Perhubungan	79	149.410.800	284.400
	Pemasaran	9	18.205.400	32.400
	Sosial	262	343.449.960	943.200
	J u m l a h	376	561.818.860	1341.600
4. 1987/1988	Produksi	17	17.202.700	61.200
	perhubungan	68	68.810.800	241.200
	Pemasaran	3	3.440.540	10.000
	Sosial	274	254.599.960	974.400
	J u m l a h	362	344.054.000	1287.600
5. 1988/1989	Produksi	7	6.700.000	25.200
	Perhubungan	34	126.489.000	122.400
	Pemasaran	4	7.080.000	14.400
	Sosial	47	277.466.000	169.200
	J u m l a h	92	417.735.000	331.200

Sumber : Kantor Bupati Kepala daerah Tingkat II Polmas, 1991.

BAB IV

BAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah

Seperti telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam proses pembangunan, sebab tanpa partisipasi masyarakat tujuan pembangunan tak akan mungkin tercapai. Untuk itu dalam proses pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini diupayakan agar masyarakat dapat itu dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. seperti halnya dalam proses pembangunan Daerah di Kabupaten Polmas, dimana setiap kegiatan pembangunan selalu diikutsertakan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut adalah :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah penyusunan perencanaan, sebab perencanaan tersebut mempunyai fungsi yang sangat luas, sehingga penyusunannya memerlukan kecakapan agar perencanaan itu mampu melihat jauh ke depan dan sanggup meneropong berbagai segi. Karena perencanaan yang kurang teliti cenderung akan menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun tenaga dan biaya dengan segala akibatnya.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah diperlukan urutan-urutan kegiatan yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menentukan teknik-teknik yang dianggap tepat dalam rangka penyusunan program-program, baik program pembangunan daerah jangka pendek maupun program pembangunan daerah jangka panjang. Adapun urutan-urutan kegiatan perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- a. Analisa kondisi dan identifikasi permasalahan
- b. Penentuan arah dan tujuan
- c. Kerangka rencana
- d. Peramalan
- e. Formulasi dan seleksi alternatif
- f. Rencana
- g. Implementasi
- h. Monitoring
- i. Evaluasi
- j. Feed back (umpan balik).

Dalam menentukan urutan perencanaan pembangunan daerah tersebut, sebab setiap daerah berbeda permasalahan yang dihadapi. Untuk itu dalam menyusun perencanaan daerah maka norma-norma yang harus diperhatikan adalah:

- a. Kondisi fisik daerah
- b. Potensi sosial daerah
- c. Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di dalam masyarakat

d. Saling berhubungan kepentingan daerah dengan daerah sekitarnya

e. Rencana harus realistis .

Berbicara mengenai perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dilaksanakan dengan 2 cara yaitu :

a. Perencanaan dar atas (Top down of planning)

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan dari atas, yaitu baik perencanaan pembangunan dari tingkat I, maupun perencanaan pembangunan dari pusat. Untuk itu Daerah Tingkat II, sebelum membuat perencanaan pembangunan Daerah Tingkat II, terlebih dahulu harus memperhatikan perencanaan pembangunan yang dibuat Daerah tingkat I dan Pusat tersebut, agar sejalan dengan perencanaan yang dibuatnya.

b. Perencanaan dari bawah (Botton up planning)

Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam menyusun perencanaan pembangunan, diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan pada masing-masing Desa / Kelurahan yang ada dalam wilayahnya. Dalam menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan tersebut, partisipasi masyarakat sangat diharapkan, yaitu dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana kepada pihak pembuat rencana, seperti Kader

Pembangunan Desa (KPD) atau anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Data-data yang diperoleh dari masyarakat adalah merupakan masukan atau bahan dalam membuat perencanaan pada tingkat Desa/Kelurahan, melalui musyawarah LKMD. Hasil musyawarah LKMD tersebut, merupakan putusan Desa/Kelurahan yang sekaligus menjadi rencana program pembangunan Desa/Kelurahan, yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kecamatan.

Di tingkat kecamatan, seluruh perencanaan pembangunan dari masing-masing Desa/Kelurahan dipadukan melalui Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Kemudian diadakan musyawarah dan hasil musyawarah ini akan menjadi rencana program kecamatan, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Pada tingkat kabupaten ini, seluruh perencanaan pembangunan, baik yang berasal dari atas, maupun berasal dari bawah dipadukan melalui Bappeda, sebagai koordinasi perencanaan pembangunan Daerah Tingkat II.

Bila dilihat dari prosedur perencanaan pembangunan Kabupaten daerah Tingkat II Polmas tersebut, nampak bahwa keikutsertaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting, sebab pada awalnya perencanaan itu adalah berasal dari masyarakat, untuk itu partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

Tetapi namun demikian untuk dapat mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat pada tanggapan responden berikut :

TABEL V
TANGGAPAN RESPONDEN PEJABAT TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS

N = 20

No. Tanggapan Responden	f	%
1. B a i k	4	20,00
2. Cukup baik	14	70,00
3. Kurang baik	1	5,00
4. Tidak baik	1	5,00
N	20	100,00

Sumber : Hasil wawancara responden, tahun 1991.

Pada tabel V tersebut, nampak bahwa dari tanggapan para responden (pejabat) menunjukkan bahwa yang menanggapi baik adalah 4 orang (20,00 %), kemudian yang menanggapi cukup baik adalah 14 orang (70,00 %), kemudian yang menanggapi kurang baik dan tidak baik adalah 1 orang (5,00 %).

Dengan berdasar pada data-data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi

masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dapat dikategorikan cukup tinggi.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka perlu ada kesesuaian gerak kegiatan pelaksanaan dengan persiapan dan perencanaan, sebab didalam pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan yang mantap. Oleh sebab itu, pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan itu harus lebih banyak memadukan, menelusuri, mengarahkan dan melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi pelaksanaan pembangunan daerah bukan menciptakan kegiatan baru, melainkan apa yang telah direncanakan.

Pelaksanaan pembangunan akan memperoleh hasil yang maksimal ada kesinambungan, keserasian dan ketepatan penggunaan bahan, waktu, tenaga, tujuan dan cara melakukannya. Disamping itu yang paling menentukan adalah partisipasi penuh dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten daerah Tingkat II Polmas Bupati Kepala daerah Tingkat II Polmas Cq. Kepala kantor Pembangunan Desa bertanggung jawab atas mekanisme

pelaksanaannya. Dalam hal ini memadukan pelaksanaan pembangunan regional dengan pembangunan sektoral yang ada di daerah.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan di kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, adalah partisipasi penuh dari masyarakat. hal ini terbukti bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas pada tahun 1989 mendapat penghargaan Prasanya Purna Karya Nugraha dari Pemerintah pusat, atas keberhasilannya dalam pembangunan daerahnya. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, pada umumnya partisipasi dalam bentuk; pikiran, tenaga, uang dan bahan. Tetapi namun demikian, untuk dapat mengetahui lebih jelas dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS
N = 60

No. Bentuk Partisipasi	f	%
1. P i k i r a n	3	5,00
2. T e n a g a	37	61,67
3. U a n g	15	25,00
4. B a h a n	5	8,33
N	60	100,00

Sumber: diolah dari hasil kuesioner, tahun 1991

Pada tabel di atas, nampak bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, menurut tanggapan dari para responden (masyarakat) menurut jenis partisipasi adalah; dalam bentuk pikiran yang menanggapi 37 orang (61,17 %), disusul dalam bentuk uang yang menanggapi 15 orang (25 %), dan dalam bentuk bahan yang menanggapi hanya 5 orang (8,33 %).

Dengan demikian maka dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas memberikan partisipasinya dalam pembangunan daerah adalah dalam bentuk tenaga.

Selanjutnya bahwa tidak tertutup kemungkinan, ada masyarakat yang memberikan bantuan lebih dari satu macam apakah itu dalam bentuk pikiran, tenaga, uang dan bahan ataupun memberikan keseluruhannya.

Namun dengan adanya data mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut, belum dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasi yang diberikan sebab bentuk-bentuk partisipasi itu diberikan pada waktu tertentu saja. Namun demikian untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas, dapat dilihat pada tabel VII.

Dalam tabel VII tersebut, terlihat bahwa tanggapan dari para responden (pejabat) terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas adalah ; yang menanggapi baik sejumlah 11 orang (55,00 %), kemudian yang menanggapi cukup baik adalah 7 orang (35,00 %), selanjutnya yang menanggapi kurang baik hanya 2 orang (10,00 %) dan yang menanggapi tidak baik tidak ada.

Dari data tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas adalah baik .

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL VII
TANGGAPAN RESPONDEN PEJABAT TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II POLMAS

N = 20

No.	Tanggapan Responden	f	%
1.	B a i k	11	55,00
2.	Cukup baik	7	35,00
3.	Kurang baik	2	10,00
4.	Tidak baik	-	-
N		20	100,00

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, tahun 1991.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Pengawasan adalah merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka proses pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tindak lanjut pembangunan.

Dalam rangka lebih efektifnya pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas para aparat pengawas daerah maupun pengawas dari pusat, senantiasa meningkatkan pembinaan atau bimbingan ke Kecamatan atau desa-desa/kelurahan yang

ada dalam wilayahnya melalui :

- a. Mengadakan pertemuan/konsultasi para Camat; Kepala Desa/Kelurahan dan para pengurus LKMD/PKK desa untuk pemantapan pelaksanaan pembangunan .
- b. Pertemuan secara rutin bagi Kepala Urusan Pembangunan se Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam rangka penertiban pembangunan bantuan pembangunan desa.
- c. Atas dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polmas No. 151/BKDH/VIII/1989 tanggal 1 - 8 - 1989 tentang Tim Pengendali Tehnis Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, dalam bentuk Tim melaksanakan tugas bimbingan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk dapat menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas, diharapkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat dimana berfungsi sebagai sosial kontrol, dalam hal ini dimaksudkan dapat mengadakan pengawasan dengan memberikan informasi terhadap pihak pengawas bila ada pelaksanaan dari pembangunan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau dapat melaporkan kepada LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

TABEL VIII
TANGGAPAN RESPONDEN PEJABAT TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II POLMAS

N = 20

No.	Tanggapan Responden	f	%
1.	B a i k	4	20,00
2.	Cukup baik	5	25,00
3.	Kurang baik	8	40,00
4.	Tidak baik	3	15,00
	N	20	100,00

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, tahun 1991.

Pada tabel VIII tersebut, nampak bahwa tanggapan dari para responden tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas adalah; yang menanggapi baik 4 orang (20,00 %), kemudian menanggapi cukup baik 5 orang (25,00 %) dan yang menanggapi kurang baik sebanyak 8 orang (40,00 %) serta yang menanggapi tidak baik adalah 3 orang (15,00 %).

Dengan melihat data yang tersaji di atas, maka dapat dikategorikan bahwa partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, masih kurang baik.

B. Hasil-Hasil Yang Dicapai

Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Polmas, sebagai program nasional dalam Pelita IV nampak dari tahun ke tahun meningkat, baik dalam jumlah bantuan, sasaran penggunaan dan pembiayaan maupun partisipasi masyarakat dalam wujud swadaya gotong royong, sehingga berhasil dibangun beberapa proyek yang dapat menyentuh kebutuhan dalam masyarakat pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas.

Dalam pengalokasian Inpres Bantuan Pembangunan Desa Daerah Tingkat II Polmas, dimana dalam setiap tahun anggaran ditetapkan oleh SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan SK. Gubernur tersebut, maka oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polmas, juga mengeluarkan Sk setiap tahun anggaran terhadap program Inpres Bantuan Desa yang ada dalam pengawasan dan penggunaannya. Adapun hasil-hasil yang dicapai Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, sehubungan pelaksanaan Inpres Bantuan Desa selama Pelita IV dapat dilihat pada tabel IX.

TABEL IX

HASIL-HASIL DICAPAI INPRES BATUAN DESA DAERAH
TINGKAT II POLEWALI DALAM PELITA IV

NoKecamatan/ Jenis Proyek	Jumlah Proyek dan Sumber Biaya Dalam Ribuan Rupiah											
	1984/1985 Jumlah Proyek	1984/1985 (%)	1985/1986 Jumlah Proyek	1985/1986 (%)	1986/1987 Jumlah Proyek	1986/1987 (%)	1987/1988 Jumlah Proyek	1987/1988 (%)	1988/1989 Jumlah Proyek	1988/1989 (%)	Inpres	Swadaya
1. Polewali												
Produksi	3	1942	4	1862	2	1178	583	1	614	295	1875	637
Perhubungan	7	3471	6	2793	12	7070	3496	8	4909	2364	5625	1913
Pemasaran	1	456	2	931	1	589	291	3	1841	886	1250	425
Sosial	15	6631	17	7914	8	4713	2330	10	6136	2955	6250	2125
Jumlah	26	12500 (70)	29	13500 (71)	23	13550 (67)	6700 (33)	22	13500 (67)	6500 (33)	15000 (75)	5100 (25)
2. Homomulyo												
Produksi	4	2122	5	2625	4	2439	1000	5	2305	1817	3088	3846
Perhubungan	9	4792	8	4200	14	8535	3500	13	5993	4725	7412	9229
Pemasaran	3	1591	4	2100	3	1829	750	8	3688	2907	2471	3076
Sosial	17	9015	19	9975	10	6097	2500	15	6914	5451	8029	9999
Jumlah	33	17520 (55)	36	18900 (53)	31	18900 (71)	7750 (29)	41	18900 (56)	14900 (44)	21000 (74)	26150 (26)
3. Homomulyo												
Produksi	1	625	-	-	1	675	300	1	675	471	750	509
Perhubungan	2	1250	5	2893	4	2700	1200	3	2025	1412	2250	1523
Pemasaran	1	625	-	-	-	-	-	-	-	-	750	509
Sosial	2	1250	2	1157	1	675	300	2	1350	942	750	509
Jumlah	6	3750 (45)	7	4050 (52)	6	4050 (69)	1800 (31)	6	4050 (59)	2825 (41)	4500 (60)	3050 (40)

Sumber : Kantor Bupati Daerah Tingkat II Polmas, 1991.

TABEL IX

HASIL-HASIL DICAPAI INPRES BATUAN DESA DAERAH
TINGKAT II POLENALI DALAM PELITA IV

Kecamatan/ Jenis Proyek	Jumlah Proyek dan Sumber Biaya Dalam Ribuan Rupiah											
	1984/1985 (%)		1985/1986 (%)		1986/1987 (%)		1987/1988 (%)		1988/1989 (%)		1989/1990 (%)	
	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya	Jumlah Proyek	Inpres Suadaya
1. Polewali												
Produksi	3	1942	4	1862	2	1178	1	614	3	1875	3	637
Perhubungan	7	3471	6	2793	12	7070	8	4909	9	5625	9	1913
Pemasaran	1	456	2	931	1	589	3	1841	2	1250	2	425
Sosial	15	6631	17	7914	8	4713	10	6136	10	6250	10	2125
Jumlah	26	12500 (70)	29	13500 (71)	23	13550 (67)	22	13500 (67)	24	15000 (75)	24	5100 (25)
2. Honomulyo												
Produksi	4	2122	5	2625	4	2439	5	2305	5	3088	5	3846
Perhubungan	9	4792	8	4200	14	8535	13	5993	12	7412	12	9229
Pemasaran	3	1591	4	2100	3	1829	8	3688	4	2471	4	3076
Sosial	17	9015	19	9975	10	6097	15	6914	13	8029	13	9999
Jumlah	33	17520 (55)	36	18900 (53)	31	18900 (71)	41	18900 (56)	34	21000 (74)	34	26150 (26)
3. Honomulyo												
Produksi	1	625	-	-	1	675	1	675	1	750	1	509
Perhubungan	2	1250	5	2893	4	2700	3	2025	3	2250	3	1523
Pemasaran	1	625	-	-	-	-	-	-	1	750	1	509
Sosial	2	1250	2	1157	1	675	2	1350	1	750	1	509
Jumlah	6	3750 (45)	7	4050 (52)	6	4050 (69)	6	4050 (59)	6	4500 (60)	6	3050 (40)

Sumber : Kantor Bupati Daerah Tingkat II Polmas, 1991.

Dalam tabel IX tersebut, terlihat bahwa di Kecamatan Polewali pada setiap tahun anggaran hasil-hasil yang dicapai sehubungan dengan adanya Inpres Bantuan Desa semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari anggaran tersedia untuk pelaksanaan proyek-proyek produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial baik yang berasal dari Inpres maupun yang berasal dari masyarakat pada umumnya mengalami kenaikan. Ini terbukti, bahwa pada tahun anggaran 1984/1985 jumlah proyek yang dibiayai adalah 26 buah, dengan biaya dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.12.500.000 (70 %) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.5.250.000,(30%) kemudian pada tahun 1985/1986 jumlah proyek adalah 29 buah dengan biaya dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.13.500.000 (71%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.5.550.000, (29%) kemudian pada tahun 1986/1987 jumlah proyek yang dibiaya adalah 23 buah dengan biaya dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.13.550.000 (67%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.6.700.000,(33%) kemudian pada tahun 1987/1988 jumlah proyek yang dibiayai adalah 22 buah dengan biaya dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.13.500.000 (67%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.6.500.000 (33%) dan pada tahun anggaran 1988/1989 jumlah proyek yang dibiayai 24 buah dengan biaya yang

bersumber dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.15.000.000 (75%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.5.100.000 (25%). Selanjutnya di Kecamatan Wonomulyo, pada umumnya juga mengalami kenaikan anggaran, baik yang berasal dari Inpres Bantuan Desa maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Ini terlihat, pada tahun anggaran 1984/1985 jumlah proyek yang dibiayai adalah 33 buah dengan biaya yang bersumber dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.1.500.000 (55%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.14.900.000,(45%) kemudian tahun anggaran 1985/1986 jumlah proyek yang dibiayai adalah 36 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp. 18.900.000 (53%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.16.900.000,(47%) kemudian tahun anggaran 1986/1987 jumlah proyek yang dibiayai adalah 31 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.18.900.000 (71%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.7.750.000,(29%) kemudian dalam tahun anggaran 1987/1988 jumlah proyek yang dibiayai adalah 41 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.18.900.000 (56%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.41.900.000 (44%) dan pada tahun anggaran 1988/1989 jumlah proyek yang dibiayai adalah 34 buah dengan biaya dari Inpres Bantuan Desa

adalah Rp.21.000.000 (74%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.26.150.000(26%) sedangkan di Kecamatan Sumarorong, pada umumnya juga mengalami kenaikan anggaran namun relatif kecil, baik yang berasal dari Inpres Bantuan Desa maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Ini terbukti dalam tahun anggaran 1984/1985 jumlah proyek yang dibiayai adalah 6 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.3.7750.000 (45%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.4.600.000,(55%) kemudian tahun anggaran 1985/1986 jumlah proyek yang dibiayai adalah tujuan adalah 7 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.4.050.000 (52%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp. 3.688.000 (48%) Kemudian dalam tahun anggaran 1986/1987 jumlah proyek yang dibiayai adalah 6 buah dengan biaya dari Inpres bantuan Desa adalah Rp.4.050.000 (70%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.1.800.000, (31%) kemudian tahun anggaran 1987/1988 jumlah proyek yang dibiayai adalah 6 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa adalah Rp.4.500.000 (59%) sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.2.825.000 (41%) dan dalam tahun anggaran 1988/1989 jumlah proyek yang dibiayai adalah 6 buah dengan biaya yang berasal dari Inpres Bantuan Desa

adalah Rp.4.500.000 (60%) sedangkan biaya yang berasal dari swadaya masyarakat adalah Rp.3.050.000 (40%).

Dari data-data di atas, terlihat bahwa dana yang tersedia untuk pelaksanaan proyek sarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sarana sosial dari tahun ke tahun relatif meningkat, baik yang berasal dari dan Inpres Bantuan Desa maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Hanya di Kecamatan Sumarorong penyediaan dana yang berasal dari Inpres Bantuan Desa peningkatannya hanya satu tahun anggaran yakni dari tahun anggaran 1984/1985 ke tahun anggaran 1985/1986 sedangkan tahun-tahun selanjutnya dana yang tersedia jumlahnya statis, kemudian dana yang berasal dari swadaya masyarakat peningkatannya relatif, artinya kadang meningkat kadang menurun.

C. Faktor-aktor Penghambat

Pelaksanaan Inpres Bantuan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana telah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi ini terlihat dalam proses pembangunan yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan cukup baik. Tetapi namun demikian di lain pihak masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi, yang mana merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Inpres Bantuan Desa, sehingga ada sebahagian

pelaksanaannya belum mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Geografis

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Daerah tingkat II Polmas, keadaan geografisnya mempunyai 3 dimensi, yakni wilayah kecamatannya yang berada di daerah pegunungan, daratan dan daerah pantai.

Dari ke tiga keadaan tersebut, adalah merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Tingkat II Polmas. khususnya wilayah-wilayah yang berada di daerah pegunungan, sebab ada sebahagia daerah yang belum dapat terjangkau oleh alat transportasi, serta pusat-pusat komunikasi, sehingga di dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan mengalami berbagai kesulitan, seperti halnya dalam :

a. Perencanaan

Dalam hal ini, dengan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, maka masyarakat kurang aktif dalam kegiatan perencanaan, sehingga data-data yang diperoleh sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

b. Pelaksanaan

Dengan adanya daerah-daerah yang terisolasi dari

pusat-pusat kegiatan pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, belum merata sampai ke daerah terpencil.

c. Pengawasan

Dengan adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan yang dilaksanakan, diakibatkan oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat, seperti informasi mengenai manfaat dan kegunaan dilaksanakan pembangunan itu, sehingga bila ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya, masyarakat tidak mengerti kegiatan apa yang ia harus lakukan.

2. D a n a

Namun dalam Pelita IV, Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terbukti karena telah dapat memperoleh penghargaan dalam keberhasilannya membangun daerahnya yaitu Prasanya Purna Karya Nugraha. Tapi namun demikian disisi lain, sejalan dengan perkembangan penduduk, maka masih terdapat berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat penanganan lebih cepat, serta masih terdapat berbagai program yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana yang tersedia, baik yang berasal dari swadaya masyarakat.

3. Rendahnya tingkat pendidikan

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas, adalah rendahnya tingkat pendidikan baik bagi pengelola maupun masyarakat, sehingga ada sebahagian pembangunan yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Seperti halnya dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pihak pengelola pembangunan, maka kurang tenaga terampil yang dimiliki, sehingga ada sebagian proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang tidak terlaksana dengan baik. Begitu pula halnya dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, maka makna dan tujuan pembangunan itu kurang dihayati, sehingga dalam pelaksanaannya ada sebahagian masyarakat yang kurang memberikan partisipasinya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang penulis dapat dikemukakan sebagai suatu kesimpulan yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Tingkat II Polmas meliputi tiga kriteria antara lain; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan (c) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Tingkat II Polmas, dapat dilihat pada tingkat partisipasi yang diberikan dalam setiap proses pembangunan daerah antara lain; (a) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaannya telah dapat dikategorikan baik, berdasarkan prosentase tanggapan responden, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga, uang dan bahan serta pikiran. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan prosentase yang baik dan (c) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat

dikategorikan kurang baik.

3. Adapun hasil-hasil yang telah dicapai Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas selama dalam Pelita IV, khususnya dalam penggunaan dana Inpres Bantuan Desa menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, dimana terlihat baik jumlah proyek maupun jumlah dana, mengalami peningkatan. Namun dilain pihak, masih terdapat daerah-daerah yang harus dipacu agar hasil-hasil yang dicapai dapat lebih tinggi lagi.

B. S a r a n

1. Dengan menelaah lebih lanjut masalah-masalah yang dihadapi Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dalam melaksanakan pembangunan, maka salah satu faktor yang menjadi penghambat utama adalah keadaan geografis, yaitu masih banyaknya daerah-daerah yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan pembangunan. Untuk itu diharapkan agar pemerintah Daerah Tingkat II Polmas, lebih meningkatkan kegiatan pembangunan, aagar seluruh daerah-daerah dapat terjangkau alat transportasi yang memadai.
2. Selain faktor geografis tersebut, juga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas adalah kurangnya dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat. Untuk itu diharapkan bagi pemerintah

agar dapat lebih meningkatkan atau memperluas dana-dana bantuan pembangunan pedesaan seperti halnya dana Inpres dan untuk pemerintah Daerah Tingkat II Polmas, diharapkan dapat lebih memacu penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga dapat membiayai seluruh kebutuhan daerahnya, baik rutin maupun pembangunan. Selain itu diharapkan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi khususnya dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

3. Selain kedua faktor tersebut, kurangnya pendidikan yang dimiliki adalah juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Polmas. Untuk itu diharapkan bagi pemerintah Daerah Tingkat II Polmas dapat lebih meningkatkan pembinaan dengan memberikan berbagai pendidikan dan latihan terhadap personil yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembangunan daerah, agar dapat lebih terampil dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya memberikan pendidikan dan latihan terhadap kader-kader pembangunan yang berada didesa-desa agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu bagaimana meningkatkan/menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menggali seluruh potensi-potensi pembangunan yang berada di daerahnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Anonim . 1974. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Jakarta : Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- _____ . 1975. Pokok-Pokok Pengertian Tentang Lembaga Sosial Desa dan Usaha-Usaha Pengembangannya, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri R.I.
- _____ . 1984. Inpres Dati I/II/Desa dan Juklak Inpres Bades, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri R.I.
- Beratha, I.Nyoman. 1982. Desa Masvarakat Desa dan Penbangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Handayaniingrat, Soewarno . 1989. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manaiemen, Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Kansil, C.S.T. 1984. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta : Aksara Baru.
- Marbun, B.N, 1983. Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000, Jakarta : Erlangga.
- P.J. Bouman. 1976. Sosiologi Pengertian dan Masalah. Jakarta : Yayasan kanisius.

- Siagian, S.P. 1983. Administrasi Pembangunan, Jakarta :
Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1981 Metode
Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES.
- Siswanto, Joko. 1988. Administrasi Pemerintahan Desa,
Bandung: Armico.
- Soejatmoko. 1983. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan,
Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar,
Jakarta : CV. Rajawali.
- Surianingrat, Bayu. 1981. Pemerintah dan Administrasi
Desa, Jakarta : Aksara Baru.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi
Pembangunan, Jakarta : LP3ES
- B. LAIN-LAIN
- Abdullah, M.Syukur. 1987. Bunga Rampai Administrasi
Pembangunan (Diktat), Ujung Pandang.
- Saggaf, M.Said. 1975. Beberapa Pengertian dan Pokok
Kebijakan Pembangunan Masyarakat Desa,
(Diktat), Santiaji Propinsi Sulawesi Selatan,
Ujung Pandang.